

Katalog 430100214

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI RIAU



2020



*BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU*

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI RIAU



2020

Statistik Pendidikan Provinsi Riau 2020

ISBN. : 978-602-5665-49-3
No. Publikasi : 14000.2119
Katalog : 4101002.14
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 74 halaman

Naskah :

BPS Provinsi Riau

Penyunting :

BPS Provinsi Riau

Gambar Kulit :

BPS Provinsi Riau

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dicetak oleh

CV.MN.Grafika

Sumber Ilustrasi

freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Pendidikan adalah proses terencana sebagai investasi masa depan, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan yang bermutu menjadi modal sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Statistik Pendidikan Provinsi Riau 2020 memberikan gambaran kondisi pendidikan di Provinsi Riau berdasarkan hasil Susenas Maret 2020. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Ajaran 2019/2020. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, dan sarana prasarana pendidikan.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa datang.

Pekanbaru, Juni 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau


Drs. Misfaruddin. M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Bab 1 Pendahuluan.....	3
Pembangunan Pendidikan, Kini dan Nanti	3
Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pembangunan	6
Bab 2 Sarana dan Prasarana	11
Jumlah Sekolah dan Peserta Didik	11
Kondisi dan Kecukupan Ruang Kelas	16
Perpustakaan Mendukung Proses Pembelajaran	19
Kualifikasi dan Beban Kerja Guru.....	20
Bab 3 Partisipasi Sekolah	25
Partisipasi Sekolah	25
Angka Partisipasi Kasar	29
Angka Partisipasi Murni.....	31
Bab 4 Kegiatan Siswa	37
Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Siswa	37
Siswa dalam Dunia Kerja.....	40
Siswa dalam Kegiatan Mengurus Rumah Tangga	41
Bab 5 Hasil dan Capaian Proses Pendidikan	45
Angka Melek Huruf	45
Tingkat Pendidikan	47
Rata-rata Lama Sekolah	49
Daftar Pustaka	53
Catatan Teknis	57
Hasil Penghitungan <i>Sampling Error</i>	63

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020	12
Tabel 2.2	Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020	14
Tabel 2.3	Rasio Murid per Rombel dan Rasio Rombel per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020	18
Tabel 2.4	Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Perpustakaan Terhadap Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020	19
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah di Provinsi Riau, 2020	26
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Riau, 2020	28
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Riau, 2020	30
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Riau, 2020	32
Tabel 4.1	Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi Selama 3 Bulan Terakhir di Provinsi Riau, 2020	38
Tabel 5. 1	Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Riau, 2020	46

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Persentase Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020	13
Gambar 2.2	Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020	15
Gambar 2.3	Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020	16
Gambar 2.4	Persentase Guru Layak Mengajar Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020	21
Gambar 2.5	Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020	22
Gambar 3.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Riau, 2020	33
Gambar 4.1	Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, 2020	39
Gambar 4.2	Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Riau, 2020	41

Gambar 4.3	Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Riau, 2020	42
Gambar 5. 1	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Riau, 2020	47
Gambar 5. 2	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2020	48
Gambar 5. 3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Riau, 2020	50

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

UUD 1945
PASAL 31



SDG's Tujuan ke-4

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua



Bab 1 Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tersebut dipertegas pada Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 kemudian menekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan di negara Indonesia.

Pendidikan, dalam pengertiannya yang paling luas, memainkan peran yang makin besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara manusia hidup dan bertindak. Pendidikan pun menjadi investasi masa depan, karena dengan pendidikan manusia mampu menyesuaikan cara berpikirnya mengembangkan segala potensi diri, dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan menjadi modal dalam mengantarkan negara dan masyarakat berinteraksi pada skala global menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Meskipun bukan jalan yang singkat untuk dapat dilalui namun merupakan salah satu bekal yang bisa diandalkan dan secara tidak langsung menjadi modal pembangunan bagi negara.

Pembangunan Pendidikan, Kini dan Nanti

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu bidang ini menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas

pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020-2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Salah satu tantangan dalam pembangunan pendidikan sebagaimana yang diulas dalam narasi RPJMN 2020-2024 adalah adanya revolusi industri 4.0. Semakin berkembangnya teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam membantu proses pembangunan di bidang pendidikan yaitu melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*). Hal ini sangat diperlukan mengingat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia yang terjadi sejak awal Maret tahun 2020. Sejumlah tindakan pencegahan diinstruksikan kepada sekolah maupun perguruan tinggi untuk mencegah penyebaran COVID-19 sebagaimana tertera dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan. Termasuk diantaranya meningkatkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), mencuci tangan pakai sabun (CTPS), serta menjaga jarak khususnya untuk sekolah yang berada di wilayah dengan tingkat resiko penyebaran virus COVID-19 yang tinggi.

Semakin tingginya jumlah kasus positif COVID-19 menuntut pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil beberapa kebijakan pendidikan diantaranya proses belajar siswa dilakukan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh, mekanisme penerimaan peserta didik baru harus mengikuti protokol kesehatan dan jika bisa dilakukan secara *online*, dan dana bantuan operasional sekolah dapat digunakan untuk membiayai keperluan pencegahan pandemi COVID-19. Selain itu kenaikan kelas dan kelulusan ditentukan berdasarkan nilai rapor, serta dibatalkannya Ujian Nasional (UN) tahun 2020 sehingga keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan

yang lebih tinggi (Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020). Pendidikan memang sangat penting bagi kemajuan generasi penerus bangsa, namun faktor kesehatan juga tetap harus diutamakan demi keberlangsungan masa depan bangsa.

Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pembangunan

Pendidikan dan pembangunan berada dalam suatu proses yang saling mengisi. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Parameter dari keberhasilan suatu sistem pendidikan adalah dengan melihat hasil capaian pendidikan. Hal ini juga menjadi satu cara untuk memprediksi masa depan bangsa.

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia. Informasi tersebut digambarkan melalui berbagai macam indikator yang berkaitan dengan capaian pembangunan di bidang pendidikan dan disajikan dalam bentuk buku publikasi “Statistik Pendidikan Provinsi Riau 2020”. Publikasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan di Provinsi Riau pada tahun 2020.

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020 serta data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2019/2020. Data-data yang disajikan didisagregasi

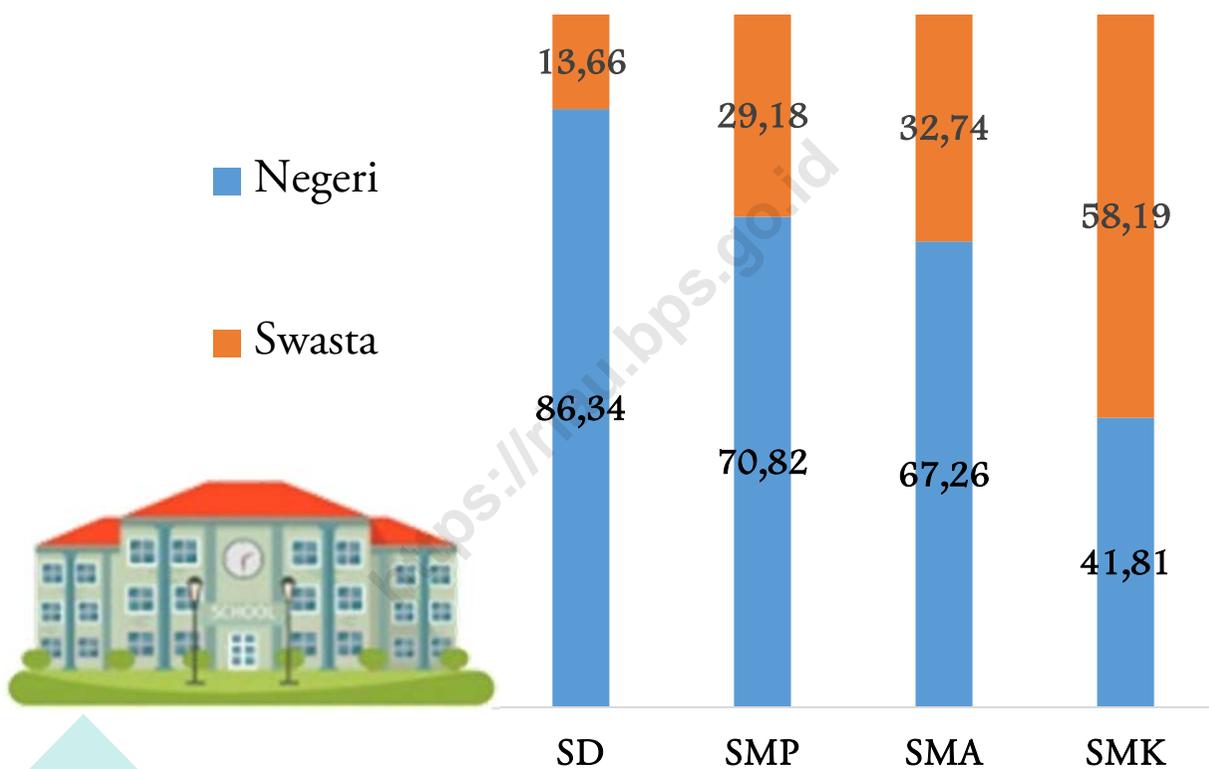
menurut jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan daerah tempat tinggal, sehingga diharapkan mampu menggambarkan pemerataan pendidikan di Provinsi Riau.

Pembahasan utama publikasi ini dirinci ke dalam lima bab. Bab pertama berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajian. Bab kedua menyajikan pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan unsur penunjang peningkatan kualitas pendidikan. Bab ketiga menyajikan pembahasan mengenai partisipasi pendidikan menurut jenjang pendidikan. Bab keempat memberikan penjelasan tentang kegiatan siswa yang mencakup akses siswa terhadap teknologi dan informasi, siswa yang bekerja, dan siswa yang mengurus rumah tangga. Bab kelima membahas tentang hasil dan capaian proses pendidikan yang ditunjukkan melalui beberapa indikator antara lain pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, dan Angka Melek Huruf.

Kemudian guna melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel, hasil penghitungan *sampling error* dari hasil estimasi beberapa indikator pendidikan juga ditampilkan pada bagian akhir publikasi ini. Sementara penjelasan mengenai konsep definisi disajikan dalam catatan teknis.

SARANA DAN PRASARANA

Persentase Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta (%)



Sekolah di Provinsi Riau, didominasi oleh sekolah negeri daripada swasta kecuali pada jenjang SMK.

Bab 2

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian dari standar pendidikan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003, bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tanpa ada kendala. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Pada bab ini disajikan data-data sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Jumlah Sekolah dan Peserta Didik

Pemerintah berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan maupun sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Salah satu upaya yang cukup terasa dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Beberapa tahun terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem

penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi percepatan pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan. Pemanfaatan zonasi nantinya akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan.

Tabel 2.1 memperlihatkan perkembangan jumlah sekolah per jenjang pendidikan selama dua tahun terakhir. Di Provinsi Riau, pertumbuhan jumlah sekolah tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan SMP (2,40 persen). Hal tersebut disinyalir karena meningkatnya jumlah lulusan pada jenjang SD. Selain itu, dengan diterapkannya aturan PPDB berbasis zonasi maka sekolah lebih memprioritaskan siswa dengan kartu keluarga atau domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menambah jumlah atau kapasitas sekolah di daerahnya agar bisa menampung jumlah siswa yang bertambah.

Tabel 2. 1 Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

Jenjang Pendidikan	2018/2019	2019/2020	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	3 693	3 727	0,92
SMP	1 168	1 196	2,40
SMA	443	449	1,35
SMK	295	299	1,36

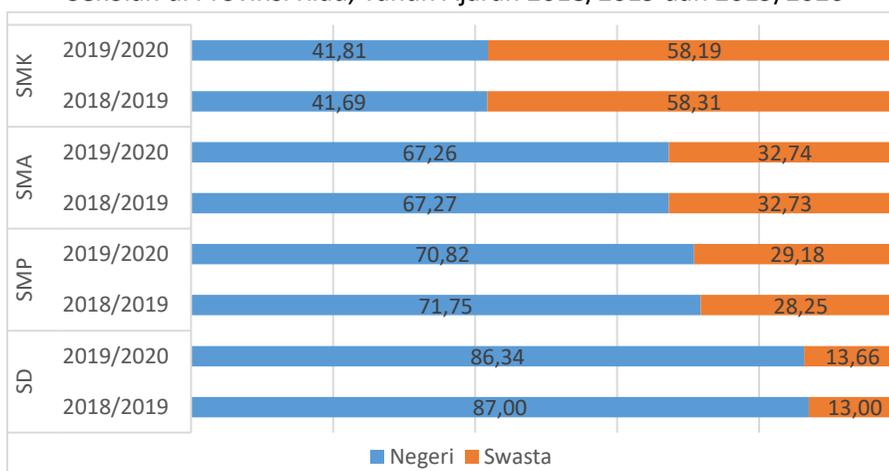
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selain kebijakan zonasi pada PPDB, upaya *regrouping/* penggabungan sekolah dasar negeri masih berlanjut beberapa tahun belakangan. Kebijakan penggabungan sekolah menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kurangnya tenaga pengajar ataupun minimnya daya serap siswa. Hal tersebut dilakukan sehubungan efektivitas dalam pembelajaran

dan pengelolaan pendidikan, efisiensi dalam penganggaran, dan permasalahan kondisi geografis. Namun demikian, di Provinsi Riau, penggabungan sekolah dasar negeri tersebut masih diimbangi dengan bertambahnya sekolah dasar negeri baru dan sekolah dasar swasta yang dibangun dengan pertumbuhan sebesar 0,92 persen, sehingga jumlah sekolah dasar secara keseluruhan masih meningkat jumlahnya.

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga swasta dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kontribusi pihak swasta sebagai penyelenggara pendidikan terlihat semakin besar dibanding tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA pemerintah mendominasi dalam penyediaan bangunan sekolah, namun semakin tinggi jenjang pendidikan, kontribusi swasta justru lebih besar.

Gambar 2.1 Persentase Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sejalan dengan peningkatan jumlah SMK tersebut, peningkatan jumlah peserta didik di SMK juga terlihat pada tahun ajaran 2019/2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data Kemendikbud menunjukkan bahwa penambahan peserta didik pada jenjang SMK lebih banyak dibandingkan penambahan peserta didik SMA. Hal tersebut menggambarkan tingginya minat peserta didik untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan. Tingginya minat tersebut diharapkan dapat menjawab keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja melalui lulusan-lulusan SMK sebagai tenaga kerja terampil dan siap pakai.

Tabel 2.2 Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020

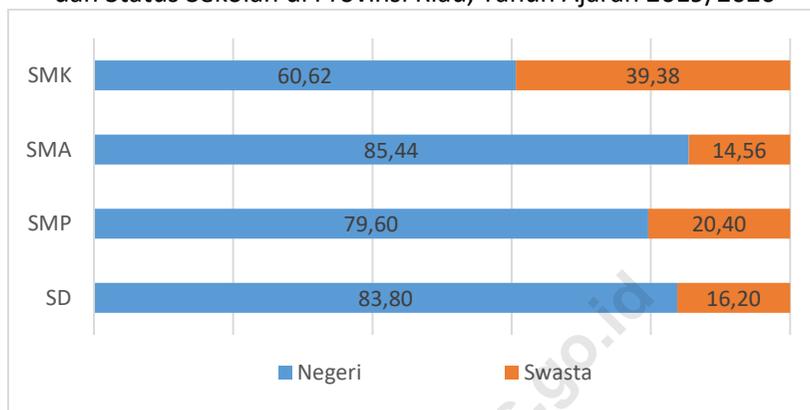
Jenjang Pendidikan	2018/2019 (000)	2019/2020 (000)
(1)	(2)	(3)
SD	798,8	807,9
SMP	260,8	262,5
SMA	154,3	160,8
SMK	97,2	104,2

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sejalan dengan pola jumlah sekolah berdasarkan status negeri dan swasta, jumlah peserta didikpun mengikuti pola yang sama untuk jenjang SD dan SMP. Menariknya, meskipun pada jenjang SMA distribusi jumlah sekolah negeri dan swasta tidak jauh berbeda (67,26 persen dan 32,74 persen), namun dari distribusi jumlah peserta didik masih terlihat kesenjangan yang besar yaitu 85,44 persen berbanding 14,56 persen untuk SMA negeri berbanding swasta. Begitu pula pada jenjang SMK, jumlah sekolah SMK swasta justru lebih banyak dibandingkan dengan SMK negeri, akan tetapi jumlah peserta didik SMK negeri masih lebih banyak dibandingkan dengan SMK swasta. Hal itu menandakan bahwa walaupun jumlah SMK swasta sudah

lebih banyak dibandingkan jumlah SMK negeri, namun daya tampung SMK swasta belum setara dengan daya tampung SMK negeri.

Gambar 2.2 Persentase Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020



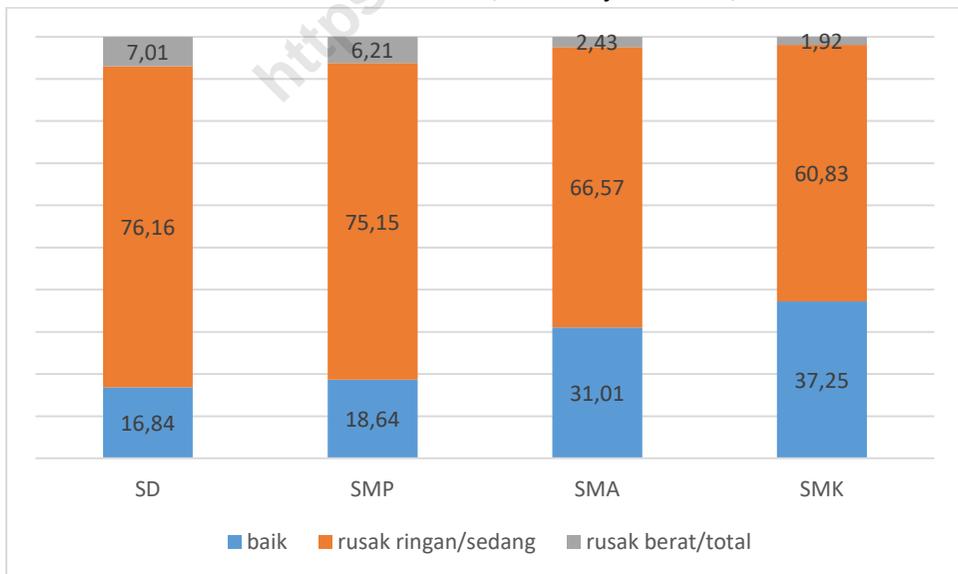
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peserta didik didominasi oleh peserta didik sekolah negeri daripada swasta. Daya tarik dari sekolah negeri salah satunya adalah biaya sekolah yang lebih rendah karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Hal ini terjadi pada semua jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, bahkan SMK yang jumlah sekolah negerinya lebih sedikit dibanding swasta pun didominasi oleh peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri. Pada jenjang pendidikan SD, persentase peserta didik sekolah negeri lebih kecil dari pada persentase sekolah negeri. Artinya, daya tampung SD negeri lebih kecil dibandingkan dengan SD swasta. Berbeda dengan jenjang pendidikan di atasnya, persentase peserta didik sekolah negeri lebih besar dibandingkan dengan persentase sekolah negeri. Artinya, daya tampung sekolah negeri lebih besar dibandingkan dengan sekolah swasta pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK.

Kondisi dan Kecukupan Ruang Kelas

Salah satu hal yang paling penting dalam proses belajar mengajar adalah tersedianya fasilitas belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah harus sesuai standar mutu pendidikan yang telah ditentukan, sehingga akan mendukung proses pembelajaran yang lebih kondusif. Sayangnya, ruang kelas yang ada masih didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat/total. Meski usaha peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah telah dilakukan melalui program rehabilitasi atau renovasi bangunan sekolah yang dicanangkan oleh Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag), dan beberapa kementerian lainnya, nyatanya kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah ruang kelas yang rusak masih harus menempuh jalan yang panjang.

Gambar 2.3 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020



Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa persentase ruang kelas dengan kondisi rusak pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA dan SMK). Bahkan pada jenjang SD, hanya 16,84 persen ruang kelas dalam kondisi baik. Melihat fenomena yang telah dipaparkan tersebut, sepertinya diperlukan tata kelola anggaran pendidikan yang lebih bijak dan berpihak pada penyelesaian hal mendasar dalam peningkatan kualitas pendidikan, termasuk juga penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Tantangan bukan hanya berhenti pada pemenuhan ruang kelas yang berkondisi baik saja, melainkan kecukupan antara ruang kelas dan rombongan belajar (rombel) yang tersedia dengan jumlah murid juga harus diperhatikan. Kecukupan ruang kelas yang tersedia tersebut dapat dilihat dari ukuran rasio rombel per kelas. Dalam data pokok pendidikan Kemendikbud, rombongan belajar atau rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan, atau identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah. Jumlah rombongan belajar dalam suatu satuan pendidikan menjadi sangat penting untuk menetapkan jumlah jam mengajar yang harus dipenuhi oleh setiap guru pada satuan pendidikan tersebut.

Menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat menyebutkan bahwa pada jenjang SD satu rombel layaknya mencakup 20-28 peserta didik (murid). Sementara itu, pada jenjang SMP setidaknya terdiri dari 20-32 murid, jenjang SMA mencakup 20-36 murid, sedangkan cakupan pada jenjang SMK setidaknya mencakup 15-36

murid. Sehingga, secara rata-rata sebenarnya rasio murid per rombongan belajar sekolah di Provinsi Riau telah memenuhi persyaratan rombel yang diatur dalam peraturan tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rasio Murid per Rombel dan Rasio Rombel per Kelas Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid per Rombel	Rasio Rombel per Kelas
(1)	(2)	(3)
SD	24	1,03
SMP	28	0,89
SMA	31	0,93
SMK	27	0,98

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hal lain yang tidak boleh luput dari perhatian adalah rasio rombel per kelas. Idealnya jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Hal ini menandakan seharusnya tidak ada ruang kelas yang digunakan sebagai sarana belajar untuk dua atau lebih rombel yang berbeda. Berdasarkan Tabel 2.3, hanya jenjang pendidikan SD yang memiliki angka rasio rombel per kelas di atas 1 yaitu 1,03. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada rombel pada jenjang SD yang tidak memiliki kelas dan harus menumpang ruang kelas lain. Hal tersebut biasanya diatasi dengan penggunaan ruang kelas secara bergantian.

Pada jenjang yang lebih tinggi, rasio rombel per kelas sudah di bawah angka 1 atau jumlah kelas yang tersedia lebih banyak daripada jumlah rombel yang ada. Kondisi ini bisa saja dikarenakan penambahan jumlah kelas sudah dilakukan, namun belum dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran karena berbagai alasan seperti menunggu tahun ajaran baru, menyiapkan kelengkapan fasilitas di dalam kelas, dan sebagainya.

Perpustakaan Mendukung Proses Pembelajaran

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Peserta didik diharapkan dapat memfungsikan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, sehingga pengetahuannya menjadi luas dan berkualitas. Mewujudkan perpustakaan sekolah yang memadai dan sesuai standar perlu diprioritaskan, agar perpustakaan dapat menjadi sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Perpustakaan Terhadap Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Perpustakaan	Persentase
(1)	(2)	(3)
SD	2 499	67,05
SMP	1001	83,70
SMA	443	98,66
SMK	244	81,61

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

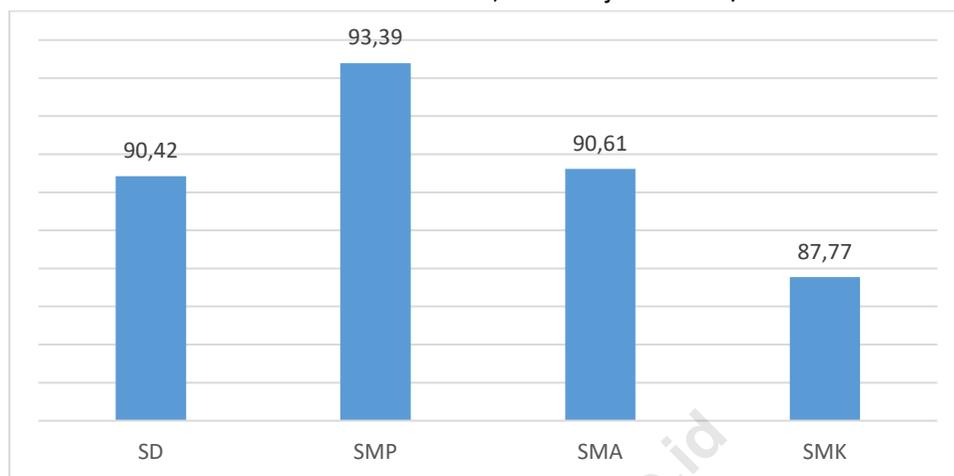
Secara umum, jenjang pendidikan SMA memiliki persentase perpustakaan terhadap sekolah yaitu sebesar 98,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 SMA hanya 2 sekolah saja yang tidak memiliki perpustakaan. Sedangkan persentase terendah terdapat pada jenjang SD, di mana hanya 67 dari 100 SD memiliki fasilitas perpustakaan di sekolah. Pemerintah selaku pembuat regulasi hendaknya memberikan perhatian terhadap hal ini, khususnya pada jenjang pendidikan SD sebagai jenjang awal dimana seharusnya budaya gemar membaca sudah mulai ditanamkan.

Kualifikasi dan Beban Kerja Guru

Satu hal lagi yang memegang peranan yang sangat krusial dalam kegiatan belajar mengajar adalah tersedianya guru/tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan guru adalah seseorang yang akan membimbing dan mengajar para murid yang pada akhirnya turut menentukan masa depan para generasi penerus bangsa. Kualifikasi guru sebagai tenaga pengajar sangat berperan dalam proses pembelajaran. Sehingga peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya tentang peningkatan sarana dan prasarana, melainkan juga tentang penetapan standar kualitas tenaga pengajarnya.

Kualitas guru menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan untuk menjamin sistem pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas guru adalah kualifikasi akademik atau ijazah yang dimiliki. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan kualitas guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menegaskan bahwa kualifikasi akademik guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA adalah minimum Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1). Guru yang telah memenuhi syarat kualifikasi akademik (guru dengan ijazah D4/S1 atau lebih tinggi) inilah yang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digolongkan sebagai guru layak mengajar (*qualified teacher*).

Gambar 2.4 Persentase Guru Layak Mengajar Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020



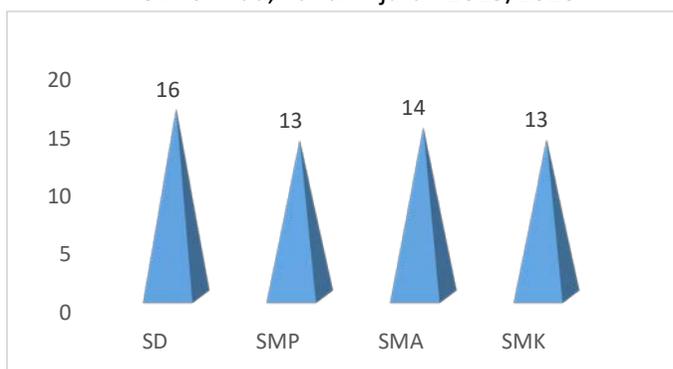
Catatan: Kepala Sekolah termasuk Guru

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan jenjang pendidikan, persentase guru layak mengajar pada jenjang pendidikan SMP merupakan yang tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 93,39 persen. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan SMK, persentase guru layak mengajar merupakan yang terendah yaitu sebesar 87,77. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SD dan SMA, persentase guru layak mengajar adalah sebesar 90,42 persen dan 90,61 persen.

Kualitas dan distribusi guru yang merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan di sektor pendidikan. Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru. Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah.

Gambar 2.5 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah di Provinsi Riau, Tahun Ajaran 2019/2020



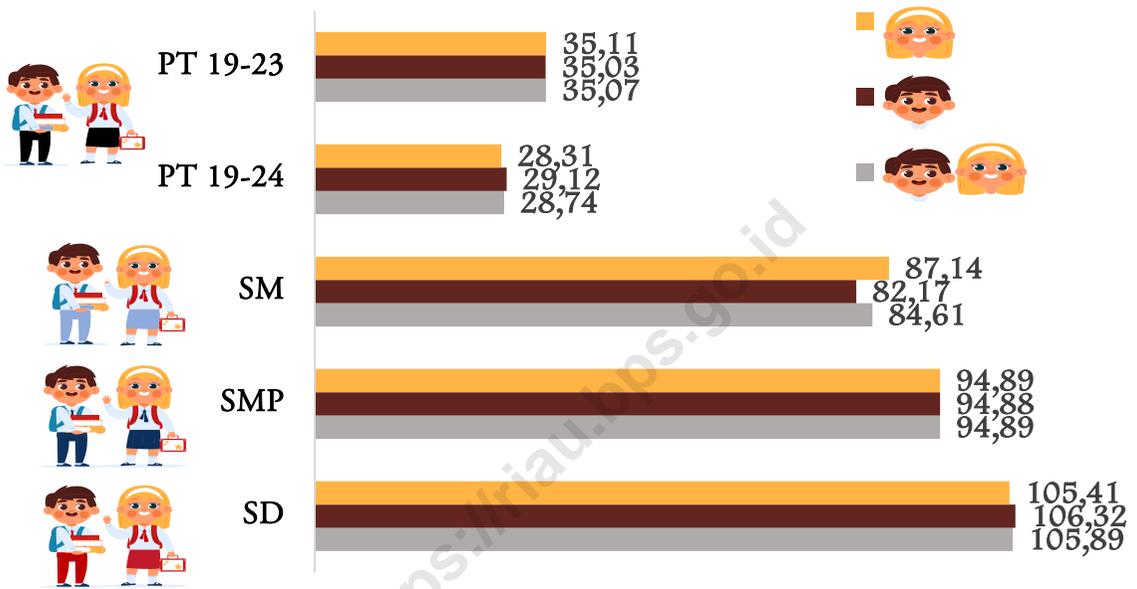
Catatan: Kepala Sekolah termasuk Guru

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Gambar 2.5 menunjukkan bahwa secara rata-rata pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Riau, seorang guru bertanggung jawab terhadap 13 sampai 16 murid. Rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Rasio murid-guru yang ideal akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas tentunya akan memengaruhi manajemen kelas, proses belajar di kelas, tapi bukan satu satunya faktor penentu untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan karena guru yang lebih terampil dan berpengalaman, misalnya, mungkin bisa menangani kelas yang lebih besar daripada yang kurang berpengalaman.

PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Kasar



<https://riau.bps.go.id>

APK pada jenjang pendidikan SD/ sederajat lebih dari 100, yang artinya anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar range 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD lebih banyak dibandingkan jumlah anak usia 7-12 tahun)

Bab 3

Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28c dan 31. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah yang merupakan hak setiap kalangan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, termasuk juga penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan keempat SDGs menjamin kualitas pendidikan inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Indikator partisipasi sekolah selain digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah diberikan pemerintah, juga untuk melihat apakah target yang ditetapkan pemerintah tercapai. Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat, yang artinya semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2020 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Partisipasi Sekolah

Manusia merupakan modal utama pembangunan. Oleh karenanya, berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu bentuk peningkatan kualitas dan pemanfaatan fasilitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk

dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa di tahun 2020 persentase penduduk 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,31 persen, yang masih sekolah sebesar 73,29 persen, dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 26,41 persen. Menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan 7-24 tahun yang sedang bersekolah lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Namun, berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk 7-24 tahun yang sedang bersekolah di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan penduduk di perkotaan. Hal ini menunjukkan masih terdapat gap antara penduduk usia sekolah yang berstatus sedang bersekolah di daerah perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah di Provinsi Riau, 2020

Karakteristik	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	0,31	73,29	26,41
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,33	72,84	26,83
Perempuan	0,28	73,77	25,95
Tipe Daerah			
Perkotaan	0,17	76,54	23,29
Perdesaan	0,40	71,08	28,52

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Di sisi lain, walaupun angkanya relatif kecil, namun masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah sekolah pada usia 7-24 tahun yaitu sebesar 0,31 persen. Persentase penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan

daerah perkotaan, yaitu 0,40 persen di daerah perdesaan dan 0,17 persen di perkotaan. Melihat hal tersebut, tentunya perhatian pemerintah harus lebih ekstra, khususnya untuk daerah perdesaan dalam hal meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan agar partisipasi sekolah masyarakat dapat ditingkatkan.

Keberhasilan pendidikan di suatu bangsa akan menciptakan sumber daya manusia unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi yang pada akhirnya menjadi generasi harapan bangsa, *engine of growth*, dan lokomotif pembangunan. Di sinilah peran penting penduduk usia sekolah 7-24 tahun diperlukan karena mereka menjadi bagian dari komposisi penduduk yang akan memanfaatkan peluang tersebut mengingat usia 7-24 tahun merupakan rentang usia sekolah, dimana hendaknya mereka yang berada pada rentang usia tersebut masih aktif dalam mengenyam pendidikan di bangku sekolah tanpa terkecuali.

Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu.

Publikasi ini menggunakan dua kelompok umur perguruan tinggi yaitu 19-24 tahun dan 19-23 tahun. Kelompok umur 19-23 tahun mengacu pada metadata indikator SDGs, sedangkan kelompok umur 19-24 tahun tetap dipertahankan untuk menjaga keterbandingan data dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Riau, 2020

Karakteristik	Kelompok Umur				
	7-12	13-15	16-18	19-24	19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	99,53	95,53	77,42	28,35	30,08
Jenis Kelamin					
Laki-laki	99,35	95,53	75,13	28,81	30,46
Perempuan	99,74	95,53	79,79	27,84	29,65
Tipe Daerah					
Perkotaan	99,49	97,39	83,88	40,61	43,02
Perdesaan	99,56	94,38	73,08	18,53	19,17

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa APS terbesar yaitu pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,53 persen atau dapat dikatakan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Lebih lanjut, terlihat bahwa partisipasi sekolah terfokus pada kelompok umur 7-18 tahun. Hal ini sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2020. Semakin meningkat kelompok umur, nilai APS semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya cenderung semakin menurun.

Menurut tipe daerah, APS daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan untuk semua kelompok umur kecuali kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok umur 7-12 tahun, sudah tidak ada kesenjangan partisipasi sekolah penduduk antara daerah perkotaan dan perdesaan. Namun, seiring bertambahnya usia, perbedaan APS perkotaan dan perdesaan semakin besar. Perbedaan terbesar berada pada kelompok umur 19-24 tahun dan 19-23 tahun yang merupakan usia

yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi, dengan perbedaan sekitar 22 dan 24 persen.

Jika dilihat lebih dalam, ketersediaan perguruan tinggi di perdesaan memang masih minim, selain itu biaya pendidikan yang relatif tinggi kerap kali menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Di tambah lagi, faktor ekonomi juga mendorong seseorang, khususnya di perdesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja.

Angka Partisipasi Kasar

Kecerdasan anak berkembang sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan. Fase perkembangan tersebut berkenaan dengan usia anak memasuki sekolah dasar yang merupakan fase awal dari seluruh jenjang pendidikan yang ditempuh. Tahapan ini menjadi sangat penting karena pada masa tersebut anak akan belajar mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka terkait minat, bakat, akademis, dan juga karakter yang akan terus dibawa hingga memasuki tingkat pendidikan selanjutnya. Jika fondasi awal pendidikan telah dibangun dengan baik, maka anak tinggal melanjutkan apa yang telah mereka kembangkan sebelumnya dengan lebih baik lagi untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sudah selayaknya persentase mereka yang mengenyam pendidikan pada jenjang SD/ sederajat tersebut cenderung tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini tergambar melalui nilai APK SD/ sederajat.

Proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut digambarkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK). Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena

ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya siswa yang sekolah walupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 3.3 memperlihatkan APK jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai Perguruan Tinggi (PT). APK untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah sebesar 105,89 persen, APK SMP/ sederajat sebesar 94,89 persen, APK SM/ sederajat sebesar 84,61 persen, APK untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (usia 19-24 tahun) sebesar 28,74 persen, dan APK untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (usia 19-23 tahun) sebesar 35,07 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK semakin rendah.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Riau, 2020

Karakteristik	Jenjang Pendidikan				
	SD	SMP	SM	Perguruan Tinggi 19-24	Perguruan Tinggi 19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	105,89	94,89	84,61	28,74	35,07
Jenis Kelamin					
Laki-laki	106,32	94,88	82,17	29,12	35,03
Perempuan	105,41	94,89	87,14	28,31	35,11
Tipe Daerah					
Perkotaan	105,75	98,20	94,19	42,10	49,95
Perdesaan	105,98	92,83	78,17	18,04	22,53

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

APK pada jenjang pendidikan SD/ sederajat melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar range 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang masih bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia SD

(7-12 tahun). Berbagai hal bisa menjadi alasan, antara lain orang tua yang terkadang mendaftarkan anak yang belum mencapai usia 7 tahun ke sekolah dasar, angka mengulang kelas yang tinggi, dan lain sebagainya.

Mungkin tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan bukan hanya milik laki-laki, perempuan pun memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sudah tidak ada lagi diskriminasi gender dalam memperoleh pendidikan di Indonesia seperti yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Hal ini terlihat dari data APK laki-laki dan perempuan yang cenderung tidak terdapat perbedaan yang berarti, bahkan pada jenjang SM, APK SM perempuan jauh melebihi APK SM laki-laki.

Berdasarkan tipe daerah, pada jenjang pendidikan SD tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara APK di perkotaan dan perdesaan. Namun pada jenjang pendidikan di atasnya, terlihat perbedaan APK yang cukup besar, terutama pada jenjang pendidikan PT baik pada usia 19-23 tahun maupun 19-24 tahun. APK di daerah perdesaan tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan APK di daerah perkotaan, selain disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, bisa juga karena penduduk di perdesaan lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan.

Angka Partisipasi Murni

Indikator lain yang dihasilkan dalam publikasi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Dapat dilihat bahwa pola APM memiliki kemiripan dengan pola APK pada tahun 2020. APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 97,73 persen kemudian semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan gender, terlihat bahwa sudah tidak ada perbedaan hak bersekolah antara laki-laki dan perempuan. APM untuk setiap jenjang pendidikan tidak memiliki perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan, bahkan APM perempuan cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan APM laki-laki terutama pada jenjang SM/ sederajat.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Riau, 2020

Karakteristik	Jenjang Pendidikan				
	SD	SMP	SM	Perguruan Tinggi 19-24	Perguruan Tinggi 19-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	97,73	80,48	64,01	23,06	24,76
Jenis Kelamin					
Laki-laki	97,90	79,70	60,68	22,90	24,63
Perempuan	97,54	81,27	67,46	23,23	24,92
Tipe Daerah					
Perkotaan	96,34	79,94	70,66	34,32	37,08
Perdesaan	98,57	80,82	59,54	14,04	14,39

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

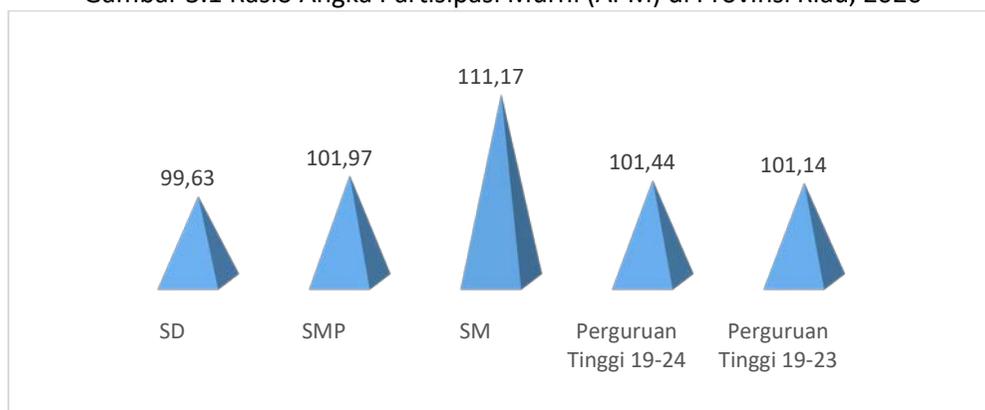
Menurut tipe daerah, APM perkotaan dan perdesaan memiliki sedikit perbedaan yang seiring meningkatnya jenjang pendidikan, perbedaan tersebut juga semakin besar, namun hal ini tidak terlihat pada APM SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di perkotaan dan di perdesaan yang memiliki nilai cenderung sama. Kesenjangan paling tinggi terlihat pada jenjang pendidikan perguruan tinggi, yaitu persentase APM daerah perkotaan lebih tinggi dari perdesaan dengan perbedaan yang mencapai lebih dari 20 persen (34,32 persen berbanding 14,04 persen) untuk kelompok

umur 19-24 tahun dan hampir 23 persen (37,08 persen berbanding 14,39 persen) untuk kelompok umur 19-23 tahun.

Kesenjangan APM antara daerah perkotaan dan perdesaan pada jenjang perguruan tinggi bisa saja disebabkan oleh kurangnya perguruan tinggi di daerah perdesaan. Dengan demikian, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan dan mengevaluasi pembangunan pendidikan yang sudah dirancang demi mengejar ketertinggalan di daerah perdesaan.

Sesuai prinsip fundamental dan pengarusutamaan gender yang diusung dalam target pencapaian SDGs 2030, kesetaraan gender juga diperlukan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan dasar. Rasio APM digunakan untuk melihat apakah pencapaian kesetaraan gender dalam aspek pendidikan telah terpenuhi atau belum. Rasio APM merupakan persentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. Nilai rasio APM sebesar 100 persen menunjukkan APM perempuan sama dengan APM laki-laki, artinya kesetaraan gender sudah terwujud.

Gambar 3.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Riau, 2020



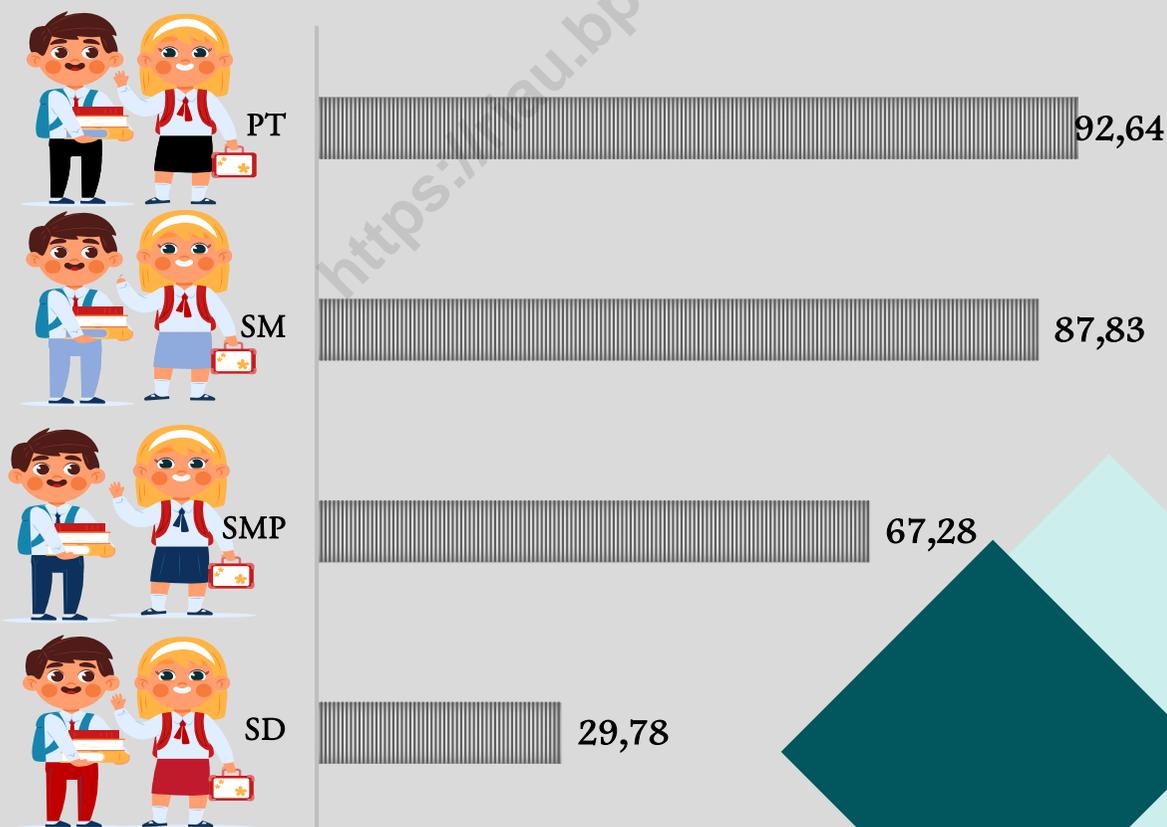
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Gambar 3.1 memperlihatkan rasio APM pada masing-masing jenjang pendidikan di Provinsi Riau. Rasio APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, yaitu sebesar 99,63 persen. Selain jenjang pendidikan SD/ sederajat, semua nilai Rasio APM sudah mencapai angka 100 persen artinya, persentase perempuan yang bersekolah tepat waktu lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Angka ini paling tinggi untuk jenjang SM/ sederajat 111,17 persen. Kecenderungan penduduk laki-laki untuk lebih memilih meninggalkan bangku sekolah ketika menginjak usia yang cukup untuk bekerja, mungkin dapat menjadi faktor penjelasnya, tetapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

<https://riau.bps.go.id>

KEGIATAN SISWA

Masih terdapat **7,46** persen mahasiswa yang tidak mengakses internet dalam tiga bulan terakhir



Siswa Usia 5-24 tahun yang menggunakan internet

Bab 4

Kegiatan Siswa

Bagi penduduk usia 5-24 tahun, bersekolah merupakan salah satu kegiatan yang menghabiskan waktu terbanyak mereka sebagai seorang siswa. Sekolah menjadi sarana utama mereka untuk belajar dan berinteraksi dengan sesama. Akan tetapi, selepas kegiatan bersekolah siswa pun dapat melakukan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan selepas bersekolah yang dilakukan oleh siswa tersebut dapat memengaruhi kualitas pendidikannya. Suatu kegiatan dapat berdampak positif apabila kegiatan tersebut bermanfaat dan mendukung proses belajar.

Pada bab ini akan dibahas beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam hal mengakses teknologi informasi dan komunikasi (telepon seluler, komputer dan internet), bekerja, dan kegiatan mengurus rumah tangga.

Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Siswa

Pada era digital sekarang ini, kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perkembangan teknologi memungkinkan berbagai informasi dapat diakses dengan mudah tanpa mengenal batasan tempat dan waktu. Salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah keberadaan gadget dan koneksi internet yang tentunya dapat mendukung berbagai bidang kehidupan manusia mulai pemerintahan, perekonomian, sosial, hingga pendidikan. Kebutuhan TIK sangat bersinggungan dengan hampir seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali kaum pelajar.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, persentase siswa dalam mengakses hal-hal yang berkaitan dengan teknologi pun juga semakin meningkat. Tercatat bahwa sekitar 78,68 persen siswa berumur 5-24 tahun menggunakan telepon seluler dalam tiga bulan terakhir, 21,18 persen menggunakan komputer, dan 53,86 persen menggunakan internet. (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi Selama 3 Bulan Terakhir di Provinsi Riau, 2020

Karakteristik	Akses TIK		
	Menggunakan telepon Seluler	Menggunakan komputer	Menggunakan internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	78,68	21,18	53,86
Jenis Kelamin			
Laki-laki	78,10	20,61	53,87
Perempuan	79,29	21,79	53,85
Tipe Daerah			
Perkotaan	84,74	33,93	68,47
Perdesaan	74,25	11,87	43,20

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

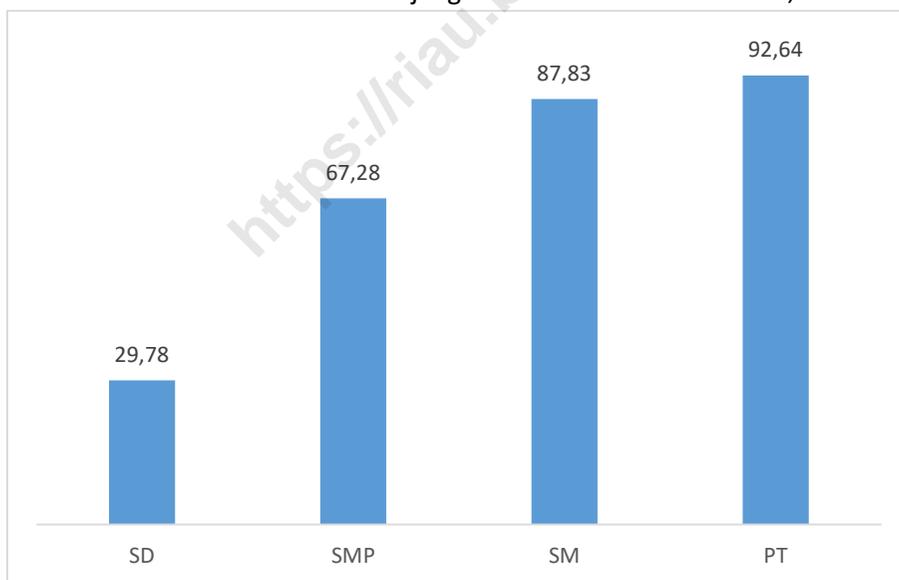
Berdasarkan tipe daerah, penggunaan telepon seluler oleh siswa perkotaan lebih tinggi dibandingkan siswa di perdesaan (84,74 persen berbanding 74,25 persen). Begitu juga dengan penggunaan komputer dan internet. Persentase siswa yang menggunakan komputer di perkotaan lebih dari dua kali lipat dibandingkan siswa di perdesaan (33,93 persen berbanding 11,87 persen). Selain itu, persentase penggunaan internet oleh siswa juga lebih tinggi di daerah perkotaan (68,47 persen) dibandingkan daerah perdesaan (43,20 persen).

Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, rata-rata persentase perempuan dan laki-laki tidak terlalu berbeda dalam mengakses TIK.

Penggunaan telepon seluler oleh siswa perempuan 79,29 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki sebesar 78,10 persen. Begitu juga dengan penggunaan komputer, persentase siswa perempuan yang menggunakan komputer sedikit lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki (21,79 persen berbanding 20,61 persen). Sedangkan persentase siswa perempuan yang menggunakan internet sebesar 53,85 persen, lebih rendah sedikit dibandingkan dengan siswa laki-laki (53,87 persen).

Kemudahan teknologi untuk mengakses informasi, sosial media, dan hiburan, secara praktis menyebabkan tingginya persentase penggunaan telepon seluler, komputer, dan internet di kalangan siswa usia 5-24 tahun.

Gambar 4.1 Persentase Siswa Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Riau, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan dapat diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka semakin meningkat pula persentase siswa yang menggunakan internet. Pada

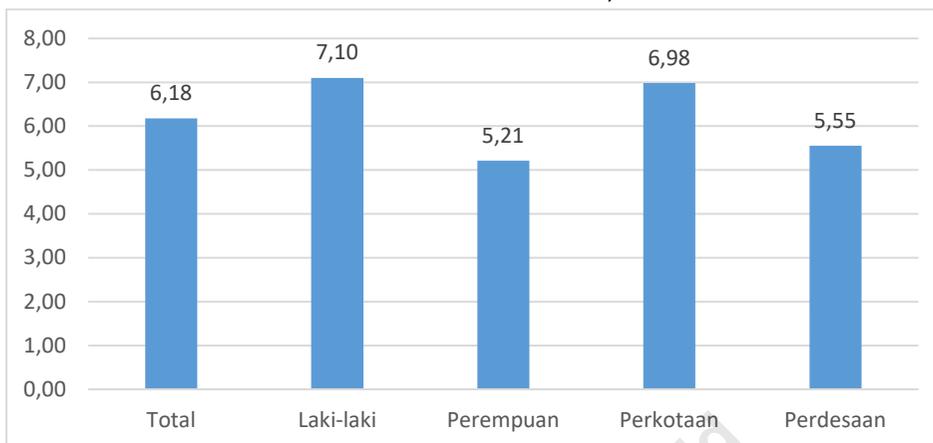
jenjang Pendidikan SD, terdapat sedikitnya 29 dari 100 siswa menggunakan internet. Pada jenjang pendidikan SM dan PT, dari segi usia, mereka sudah lebih mandiri dan mudah untuk mendapatkan akses internet. Hal ini menjadi wajar apabila persentasenya semakin meningkat. 92,64 persen mahasiswa, dan 87,83 persen siswa SM telah mengakses internet selama tiga bulan terakhir. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMP, 67,28 persen siswanya juga sudah menggunakan internet.

Siswa dalam Dunia Kerja

Siswa yang berasal dari rumah tangga dengan ekonomi sulit terkadang harus ikut serta mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan. Inilah salah satu fakta permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, dimana masih banyak siswa yang bersekolah tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja.

Salah satu tujuan siswa bersekolah adalah untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal sesuai dengan kemampuannya. Proses pencapaian prestasi belajar di sekolah dapat terhambat apabila siswa tidak mampu berkonsentrasi pada proses pembelajaran karena kelelahan bekerja dan juga tidak dapat menggunakan waktu luangnya untuk belajar di rumah. Hal tersebut akan berujung pada ketertinggalan mereka pada materi-materi pelajaran di sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 dijelaskan bahwa siswa yang berusia 13-15 tahun dibolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta tidak mengganggu waktu sekolah.

Gambar 4.2 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Riau, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa sekitar 6 dari 100 siswa usia 10-24 tahun bekerja selama seminggu terakhir. Jika dilihat dari jenis kelamin, persentase siswa laki-laki yang bekerja lebih besar (7,10 persen) dibandingkan siswa perempuan yang bekerja (5,21 persen). Berdasarkan tipe daerah, persentase siswa di perkotaan yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di perdesaan (6,98 persen berbanding 5,55 persen).

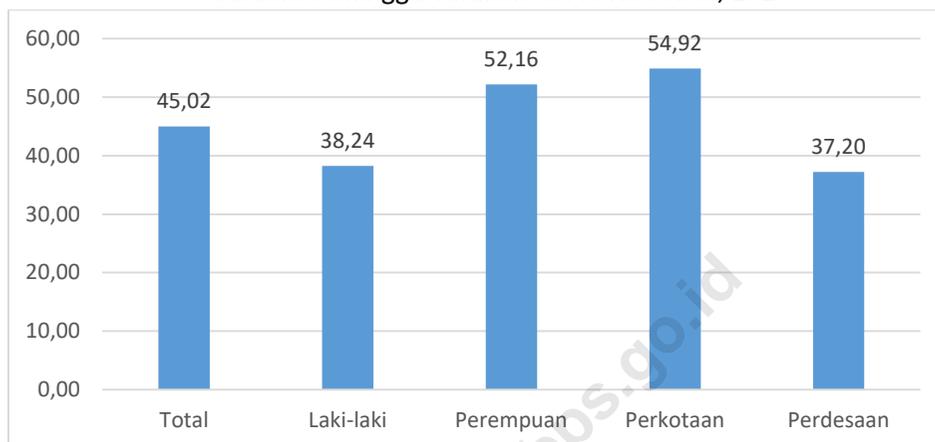
Siswa dalam Kegiatan Mengurus Rumah Tangga

Kegiatan mengurus rumah tangga meliputi kegiatan mengurus atau membantu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya. Selain belajar, kegiatan siswa lainnya bisa berupa membantu mengurus rumah tangga.

Mengurus rumah tangga bisa bermakna positif maupun negatif. Positif apabila kegiatan mengurus rumah tangga dilakukan di luar jam sekolah dan bertujuan untuk membantu tanpa mengabaikan urusan sekolah.

Sebaliknya, akan bermakna negatif apabila menyita sebagian besar waktu sehingga mengorbankan kewajiban mereka sebagai siswa.

Gambar 4.3 Persentase Siswa Usia 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir di Provinsi Riau, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sebesar 45,02 persen siswa berusia 10 – 24 tahun mengurus rumah tangga selama seminggu terakhir. Persentase siswa yang mengurus rumah tangga di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (54,92 persen berbanding 37,20 persen). Jika dilihat dari jenis kelamin, persentase siswa perempuan yang mengurus rumah tangga lebih besar (52,16 persen) dibandingkan siswa laki-laki (38,24 persen). Hal ini sesuai dengan paradigma masyarakat Indonesia yang menilai pekerjaan rumah tangga merupakan ranah perempuan.

HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN



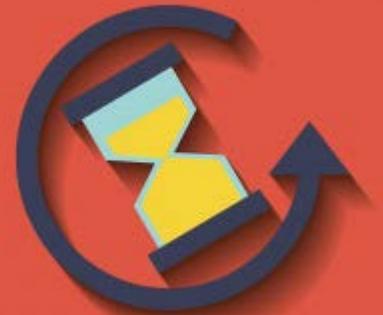
Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) Penduduk Usia 15
tahun ke Atas

9,47 tahun



Perkotaan

11,04 tahun



Perdesaan

8,39 tahun

Rata-rata penduduk perkotaan telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dengan rata-rata lama sekolah 11,04 tahun (hingga kelas 11 SM/ sederajat), sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 8 SMP/ sederajat dengan rata-rata lama sekolah 8,39 tahun

Hasil dan Capaian Proses Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berperan sebagai katalisator pembangunan. Program pembangunan pendidikan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2020 difokuskan pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Tujuan pembangunan pendidikan dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua diharapkan dapat tercapai.

Bab ini mengulas beberapa capaian pembangunan pendidikan melalui indikator pendidikan yang bersumber dari Susenas 2020. Capaian pendidikan dapat ditinjau dari Angka Melek Huruf (AMH) penduduk kelompok umur muda dan dewasa, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, dan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan.

Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Pada tahun 2020, AMH kelompok umur 15 tahun ke atas di Provinsi Riau mencapai 99,23 persen. Dibandingkan dengan AMH kelompok umur 15-59 tahun (99,93 persen) dan kelompok umur 15-24 tahun (99,94 persen), AMH kelompok umur 15 tahun ke atas merupakan yang terendah. Hal ini disebabkan karena kelompok umur 15 tahun ke atas mencakup penduduk lanjut usia yang sulit terjangkau pelaksanaan program keaksaraan fungsional dimana program ini dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun.

Tabel 5. 1 Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Riau, 2020

Karakteristik	Kelompok Umur		
	15-24	15-59	15+
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	99,94	99,93	99,23
Jenis Kelamin			
Laki-laki	99,96	99,96	99,57
Perempuan	99,92	99,89	98,86
Tipe Daerah			
Perkotaan	99,98	99,98	99,59
Perdesaan	99,92	99,89	98,98

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

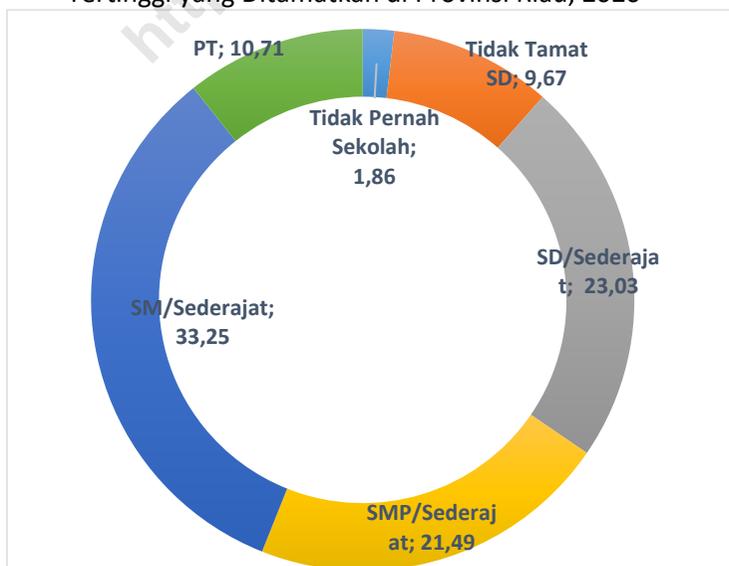
Jika merujuk pada Tabel 5.1 di atas, dua hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam memacu peningkatan AMH kelompok umur 15 tahun ke atas yakni penduduk di perdesaan dan penduduk perempuan. Hal

ini dikarenakan kelompok penduduk tersebut memiliki AMH yang lebih rendah sehingga perlu menjadi fokus pemerintah.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Provinsi Riau umumnya hanya mencapai pendidikan menengah. Data Susenas 2020 menunjukkan bahwa 33,25 persen penduduk 15 tahun ke atas adalah tamat SM/ sederajat, dan hanya sekitar 10,71 persen penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT). Pada Gambar 5.1 dapat juga dilihat bahwa di Provinsi Riau, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat SMP sederajat sebesar 21,49 persen, dan tamat SD sederajat sebesar 23,03 persen. Sedangkan penduduk yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan SD masih sebesar 9,67 persen. Sementara itu, masih ada penduduk yang tidak pernah bersekolah, yaitu sebesar 1,86 persen.

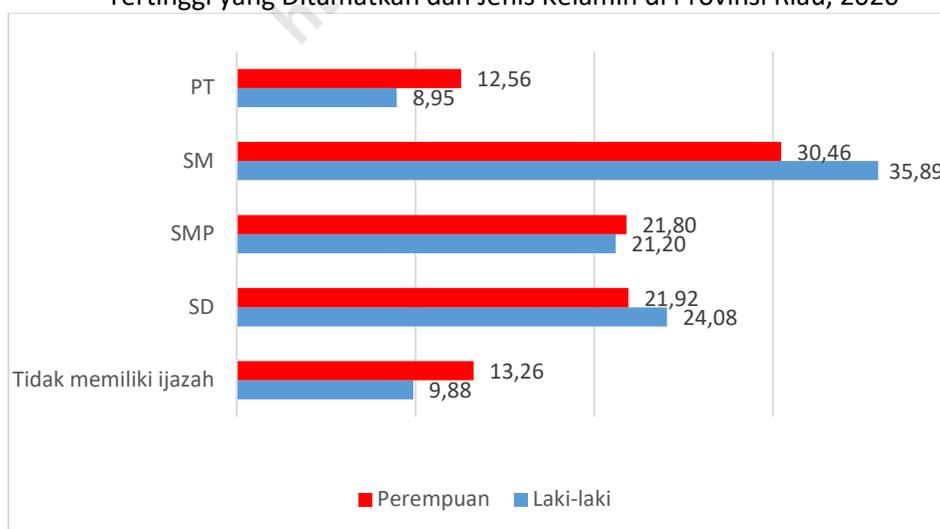
Gambar 5. 1 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Riau, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Jika dilihat berdasarkan gender, pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan masih menunjukkan adanya kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya proporsi penduduk perempuan dibandingkan laki-laki yang tidak memiliki ijazah (Gambar 5.2). Persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah sebesar 13,26 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya 9,88 persen. Selain itu, kesenjangan juga tampak pada jenjang pendidikan SM, dimana persentase penduduk laki-laki dengan pendidikan tertinggi SM lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan (35,89 persen berbanding 30,46 persen). Kesenjangan ini terjadi karena penghitungan angka tingkat pendidikan juga melibatkan penduduk dewasa dan tua, di mana pada masa lalu, perempuan memang memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Hal tersebut tidak terjadi lagi saat ini, yang ditandai dengan angka partisipasi yang relatif berimbang antara laki-laki dengan perempuan.

Gambar 5. 2 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Sementara itu, persentase penduduk laki-laki dengan pendidikan tertinggi SD atau pun SMP tidak terdapat perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan penduduk perempuan. Lain halnya, penduduk dengan pendidikan tertinggi PT, persentase perempuan yang tamat PT lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki. Persentase penduduk laki-laki yang tamat PT hanya sebesar 8,95 persen, sedangkan penduduk perempuan mencapai 12,56 persen.

Rata-rata Lama Sekolah

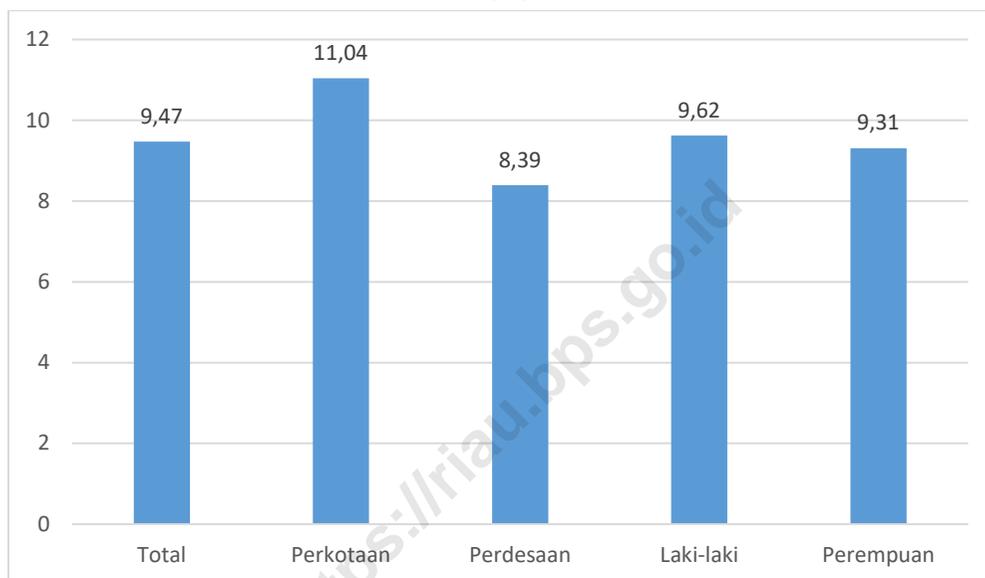
Jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang dapat dilihat berdasarkan rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sampai sejauh mana kemampuan penduduk Provinsi Riau usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah juga dapat dilihat melalui indikator ini. Sejalan dengan RPJMN 2015-2020, sejak tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada Gambar 5.3 terlihat bahwa rata-rata lama sekolah 15 tahun ke atas di Provinsi Riau pada tahun 2020 sudah lebih dari 9 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk 15 tahun ke atas di Provinsi Riau, sudah menyelesaikan jenjang pendidikan SMP. Gambar tersebut juga menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas daerah pedesaan, daerah perkotaan, penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan.

Perbandingan kehidupan desa-kota senantiasa menampilkan cerita tersendiri tentang ketimpangan yang tak berkesudahan dan kita belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan dimana selisihnya mencapai 2 tahun. Penduduk perkotaan rata-rata telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun

dengan rata-rata lama sekolah 11,04 tahun (rata-rata hingga kelas 11 SM/ sederajat), sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 8 SMP/ sederajat dengan rata-rata lama sekolah 8,39 tahun.

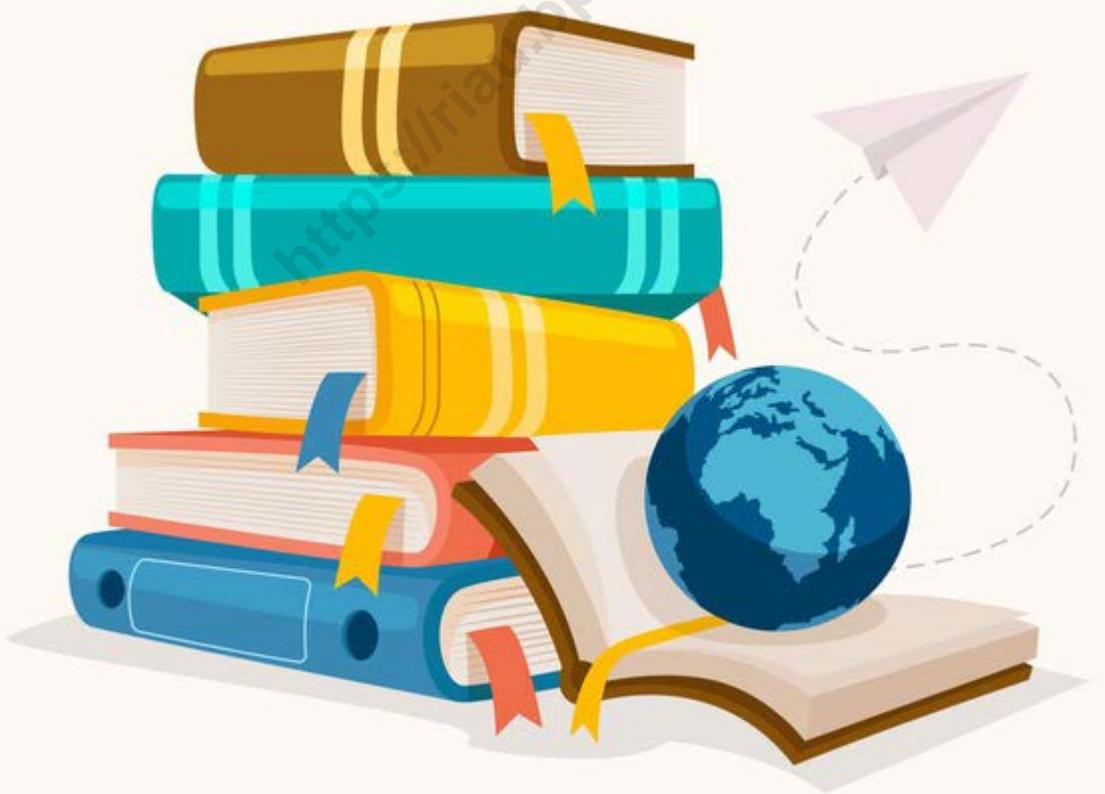
Gambar 5. 3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Riau, 2020



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Berdasarkan jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki 9,62 tahun dan penduduk perempuan 9,31 tahun. Dengan kata lain, dapat dikatakan rata-rata penduduk laki-laki maupun perempuan sudah menyelesaikan pendidikan hingga jejang SMP.

DAFTAR PUSTAKA



Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2018. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2019. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2020. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2020. *Buku 1 Pedoman Kepala BPS Provinsi, Kepala Bidang Statistik Sosial, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota Susenas Maret 2020*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

_____. 2020. *Buku 4 Konsep Definisi dan Tata Cara Pengisian Kuesioner Susenas Maret 2020*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*. Pekanbaru : BPS Provinsi Riau.

_____. 2020. *Riau dalam Angka 2020*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

Bappenas. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta: Bappenas.

Pusdatin Kemendikbud. 2020. *Statistik Persekolahan SD 2019/2020*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud

Pusdatin Kemendikbud. 2020. *Statistik Persekolahan SMP 2019/2020*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud

Pusdatin Kemendikbud. 2020. Statistik Persekolahan SMA 2019/2020.
Jakarta: Pusdatin Kemendikbud

Pusdatin Kemendikbud. 2020. Statistik Persekolahan SMK 2019/2020.
Jakarta: Pusdatin Kemendikbud

<https://riau.bps.go.id>

CATATAN TEKNIS



<https://id.au.bps.go.id>



Catatan Teknis

Susenas

merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Tahun 2020, Jumlah total sampel Susenas Maret 2020 se Indonesia sebanyak 345.000 rumah tangga, sedangkan di Provinsi Riau sebanyak 8.390 rumah tangga.

Tipe Daerah Tempat Tinggal

menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

Rumah Tangga Biasa

adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT)

adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART)

adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak Termasuk Anggota Rumah Tangga

yakni orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Rasio Murid-Guru

adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

Rasio Murid-Kelas

adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

Pendidikan Formal

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/SDLB/MI/ sederajat, SMP/SMPLB/MTs/ sederajat, SM/SMLB/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan Nonformal

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Tamat Sekolah

adalah jika responden telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tidak Punya Ijazah SD

adalah kepala ruta/anggota ruta yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1- A100, Paket A Setara SD) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga kepala ruta/anggota ruta yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.

Tidak/Belum Pernah Sekolah

adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih Bersekolah

adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak Bersekolah Lagi

adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM)

adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Melek Huruf (AMH)

adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

HASIL PENGHITUNGAN *SAMPLING ERROR*



<https://riai.bps.go.id>

Hasil Penghitungan *Sampling Error*

Estimasi dari sampel survei dipengaruhi oleh dua jenis error (kesalahan) yaitu *sampling error* dan *non-sampling error* (seperti kesalahan dalam wawancara dan kesalahan pengolahan). *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* dari suatu angka estimasi persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2020. Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

Standard error juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Tabel 1. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	99,53	0,14	99,26	99,81	0,14	1,67	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	99,35	0,24	98,88	99,83	0,24	1,95	16 065
Perempuan	99,74	0,11	99,51	99,96	0,11	0,93	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	99,49	0,29	98,91	100,00	0,29	1,85	11 889
Perdesaan	99,56	0,13	99,30	99,83	0,13	1,40	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 2. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	95,53	0,56	94,43	96,62	0,58	1,25	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	95,53	0,73	94,10	96,95	0,76	1,06	16 065
Perempuan	95,53	0,84	93,88	97,18	0,88	1,42	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	97,39	0,69	96,04	98,74	0,71	0,89	11 889
Perdesaan	94,38	0,79	92,82	95,93	0,84	1,68	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 3. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	77,42	1,31	74,85	79,99	1,70	1,68	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	75,13	1,85	71,51	78,76	2,46	1,58	16 065
Perempuan	79,79	1,71	76,44	83,15	2,14	1,52	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	83,88	1,78	80,83	87,37	2,13	1,17	11 889
Perdesaan	73,08	1,81	69,54	76,63	2,47	2,27	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 4. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah 19-24 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	28,35	1,91	24,61	32,09	6,73	6,03	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	28,81	3,00	22,93	34,70	10,41	7,73	16 065
Perempuan	27,84	1,89	24,14	31,54	6,79	2,85	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	40,61	3,45	33,84	47,38	8,50	5,39	11 889
Perdesaan	18,53	1,17	16,24	20,82	6,30	2,28	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 5. *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah 19-23 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	30,08	2,20	25,76	34,40	7,33	6,38	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	30,46	3,45	23,70	37,22	11,33	8,23	16 065
Perempuan	29,65	2,18	25,38	33,91	7,34	2,94	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	43,02	3,82	35,53	50,51	8,88	5,48	11 889
Perdesaan	19,17	1,30	16,62	21,73	6,80	2,21	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 6. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	105,89	0,65	104,61	107,16	0,61	1,55	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	106,32	0,90	104,57	108,08	0,84	1,52	16 065
Perempuan	105,41	0,90	103,65	107,17	0,85	1,43	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	105,73	1,29	103,20	108,27	1,22	1,35	11 889
Perdesaan	105,98	0,69	104,63	107,33	0,65	1,72	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 7. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	94,89	1,59	91,77	98,00	1,67	1,34	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	94,88	2,35	90,28	99,49	2,48	1,40	16 065
Perempuan	94,89	2,25	90,49	99,29	2,37	1,41	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	98,20	3,01	92,30	104,10	3,07	1,15	11 889
Perdesaan	92,83	1,77	89,36	96,31	1,91	1,54	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 8. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar SM/Sederajat menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	84,61	2,13	80,43	88,78	2,52	1,61	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	82,17	3,01	76,27	88,06	3,66	1,56	16 065
Perempuan	87,14	2,86	81,54	92,74	3,28	1,50	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	94,19	3,73	86,88	101,49	3,96	1,39	11 889
Perdesaan	78,17	2,54	73,19	83,15	3,25	1,91	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 9. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar PT 19-24 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	28,74	2,10	24,63	32,85	7,29	6,23	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	29,12	3,26	22,74	35,51	11,19	7,70	16 065
Perempuan	28,31	2,02	24,36	32,27	7,13	2,82	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	42,10	3,85	34,55	49,65	9,14	5,22	11 889
Perdesaan	18,04	1,24	15,61	20,47	6,87	2,39	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 10. *Sampling Error* Angka Partisipasi Kasar PT 19-23 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	35,07	2,42	30,32	39,81	6,90	5,39	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	35,03	3,70	27,77	42,29	10,57	6,68	16 065
Perempuan	35,11	2,44	30,32	39,90	6,96	2,58	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	49,95	4,19	41,73	58,17	8,39	4,26	11 889
Perdesaan	22,53	1,59	19,42	25,63	7,04	2,40	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 11. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	97,73	0,31	97,11	98,34	0,32	1,81	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	97,90	0,40	97,11	98,69	0,41	1,67	16 065
Perempuan	97,54	0,45	96,65	98,42	0,46	1,64	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	96,34	0,69	94,99	97,70	0,72	1,51	11 889
Perdesaan	98,57	0,27	98,04	99,10	0,27	1,75	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 12. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	80,48	1,08	78,37	82,60	1,34	1,27	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	79,70	1,54	76,67	82,73	1,94	1,26	16 065
Perempuan	81,27	1,54	78,26	84,28	1,89	1,33	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	79,94	1,91	76,19	83,70	2,39	1,09	11 889
Perdesaan	80,82	1,28	78,30	83,33	1,59	1,51	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 13. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni SM/Sederajat menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	64,01	1,45	61,16	66,85	2,27	1,55	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	60,68	2,06	56,65	64,71	3,39	1,53	16 065
Perempuan	67,46	1,94	63,66	71,26	2,87	1,43	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	70,66	2,26	66,23	75,08	3,19	1,22	11 889
Perdesaan	59,5,4	1,88	55,85	63,23	3,16	2,01	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 14. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni PT 19-24 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	23,06	1,95	19,24	26,88	8,45	7,21	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	22,90	3,10	16,82	28,98	13,55	9,59	16 065
Perempuan	23,23	1,88	19,54	26,93	8,11	3,20	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	34,32	3,61	27,24	41,39	10,52	6,30	11 889
Perdesaan	14,04	1,10	11,88	16,21	7,86	2,54	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 15. *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni PT 19-23 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	24,76	2,27	20,31	29,22	9,17	7,64	31 721
Jenis Kelamin							
Laki-laki	24,63	3,60	17,56	31,69	14,63	10,23	16 065
Perempuan	24,92	2,19	20,62	29,22	8,80	3,33	15 656
Tipe Daerah							
Perkotaan	37,08	4,03	29,17	44,99	10,88	6,41	11 889
Perdesaan	14,39	1,21	12,01	16,76	8,41	2,40	19 832

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 16. *Sampling Error* Siswa 5-24 Tahun yang Mengakses Internet menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	53,86	1,14	51,63	56,09	2,11	4,63	8 254
Jenis Kelamin							
Laki-laki	53,87	1,45	51,02	56,72	2,70	3,92	4 256
Perempuan	53,85	1,27	52,36	56,35	2,36	2,78	3 998
Tipe Daerah							
Perkotaan	68,47	1,74	65,07	71,87	2,53	3,76	3 167
Perdesaan	43,20	1,20	40,85	45,54	2,77	4,10	5 087

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 17. *Sampling Error* Siswa 10-24 Tahun yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	6,18	0,47	5,26	7,11	7,62	2,42	5 990
Jenis Kelamin							
Laki-laki	7,10	0,65	5,82	8,38	9,21	2,11	3 085
Perempuan	5,21	0,65	3,95	6,48	12,40	2,59	2 905
Tipe Daerah							
Perkotaan	6,98	0,77	5,47	8,49	11,02	1,86	2 380
Perdesaan	5,55	0,59	4,40	6,70	10,55	3,16	3 610

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 18. *Sampling Error* Siswa 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	45,02	1,71	41,67	48,37	3,80	7,48	5 990
Jenis Kelamin							
Laki-laki	38,24	2,33	33,68	42,80	6,08	7,47	3 085
Perempuan	52,16	1,77	48,69	55,63	3,39	3,85	2 905
Tipe Daerah							
Perkotaan	54,92	2,87	49,31	60,54	5,22	6,76	2 380
Perdesaan	37,20	1,77	33,74	40,66	4,75	6,45	3 610

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 19. *Sampling Error* Angka Melek Huruf 15-59 Tahun menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	99,93	0,02	99,89	99,97	0,02	1,22	20 006
Jenis Kelamin							
Laki-laki	99,96	0,02	99,91	100,00	0,02	1,56	10 030
Perempuan	99,89	0,03	99,83	99,96	0,03	1,10	9 976
Tipe Daerah							
Perkotaan	99,98	0,02	99,94	100,00	0,02	0,85	7 585
Perdesaan	99,89	0,03	99,83	99,96	0,03	1,66	12 421

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 20. *Sampling Error* Angka Melek Huruf 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	99,23	0,08	99,07	99,38	0,08	1,81	22 112
Jenis Kelamin							
Laki-laki	99,57	0,09	99,40	99,74	0,09	2,07	11 103
Perempuan	98,86	0,12	98,63	99,10	0,12	1,44	11 009
Tipe Daerah							
Perkotaan	99,59	0,08	99,43	99,74	0,08	1,07	8 390
Perdesaan	98,98	0,12	98,74	99,21	0,12	2,53	13 722

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 21. *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Estimasi	Standar Error	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Efek Rancangan	Jumlah Sampel
			Batas Bawah	Batas Atas			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	9,47	0,07	9,33	9,61	0,75	6,14	22 112
Jenis Kelamin							
Laki-laki	9,62	0,08	9,47	9,78	0,82	4,58	11 103
Perempuan	9,31	0,08	9,16	9,46	0,82	3,05	11 009
Tipe Daerah							
Perkotaan	11,04	0,11	10,82	11,26	1,03	5,64	8 390
Perdesaan	8,39	0,06	8,26	8,52	0,77	4,29	13 722

Sumber : BPS, Susenas Maret 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12, Pekanbaru 28131

Telp. (0761) 23042

Homepage : //riau.bps.go.id Email : bps1400@bps.go.id

ISBN 978-602-5665-49-3 (PDF)

